



SALINAN

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI TERBUKA CALON PEJABAT PIMPINAN
TINGGI PRATAMA ASISTEN DEPUTI KOORDINASI WAWASAN KEBANGSAAN
DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN
KEAMANAN

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta untuk menjamin terselenggaranya proses seleksi yang transparan, obyektif, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan seleksi terbuka dan penilaian secara independen bagi seluruh peserta yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan dimaksud;
 - b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Seleksi;

Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1665);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK,
HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
SELEKSI TERBUKA CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI
PRATAMA ASISTEN DEPUTI KOORDINASI WAWASAN
KEBANGSAAN DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama Asisten Deputi Koordinasi Wawasan
Kebangsaan di Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan, yang selanjutnya dalam Keputusan
Menteri ini disebut Panitia Seleksi.

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
terdiri atas:

- Ketua : Yoedhi Swastono, Sekretaris
Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- Anggota : 1. Ir. Arief Poerboyo Moekiyat, M.T., Deputi
Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa,
Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan.
2. Prof. Dr. Muchlis R. Luddin, M.A., Wakil
Rektor Universitas Negeri Jakarta;
3. ~~Dr. H. Bambang Dwi Hartono, M. Si,~~
Kepala Prodi Pascasarjana Magister
Manajemen Universitas Muhammadiyah
Prof. Dr. Hamka; dan
4. Soedarmo, Direktur Jenderal Politik dan
Pemerintahan Umum, Kementerian
Dalam Negeri.